

## ETIKA PRODUKSI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**Fahrudin Sukarno**

Dosen Program Studi Ekonomi Islam

Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor

### **Abstract:**

This study is aimed to analyse the Islamic production concept rely on its urgency in increasing human welfare in Islam society. The currency problem lied on creating the ethic axioms of production concept based on al-Qur'an and as-Sunnah. The conceptual framework of Islamic production concept is emerging the morality basic in order to implement production activities. This morality basic will affect to economic growth, distributive justice, environmental conservation program, and also corporate social responsibility.

**Keywords:** Islamic production concept, morality, aksioma tauhid, aksioma keadilan, aksioma kebajikan, aksioma kebebasan dan tanggung jawab

### **I. Pendahuluan: Konsep Produksi Islam**

مَكَدَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ . وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Sangat sedikit darimu yang bersyukur*”. (QS al-A'raf: 10)

Tidak bisa dipungkiri pengabaian konsep produksi konvensional terhadap sistem nilai telah mengakibatkan mundurnya kualitas hidup manusia dewasa ini. *Global warming* (pemanasan global), krisis air bersih, sanitasi, dan bahan makanan sering dijadikan tema global demi memperbaiki kondisi kemanusiaan<sup>1</sup>. Masalah sebenarnya dari sejumlah krisis kemanusiaan itu terletak pada mekanisme dan model produksi yang secara massif berkembang dewasa ini di setiap belahan dunia yaitu model produksi tanpa pertimbangan moral (*moral judgement*). Model produksi konvensional berangkat dari masalah kelangkaan (*scarcity*) barang-jasa dan keterbatasan kemampuan produksi untuk memenuhi keinginan manusia yang semakin hari semakin tak terbatas. Dengan demikian, ekonomi konvensional dihadapkan pada permasalahan bagaimana mengupayakan ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan individu dengan memaksimalkan produktivitas untuk menghasilkan barang-jasa<sup>2</sup>. Produsen dituntut untuk meng-efisienkan penggunaan sumber daya agar menghasilkan keuntungan maksimal. Di samping itu, produsen diharuskan mengabaikan sistem nilai agar proses produksi dapat dilakukan secara bebas.

---

<sup>1</sup> Kita masih ingat tujuan diadakannya Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim dan Pemanasan Global (*United Nation Framework Concetion on Climate Change*) di Nusa Dua Bali tanggal 3-15 Desember 2007 yang diikuti 122 negara maju dan 77 negara berkembang. Inti dari konferensi tersebut adalah pentingnya negara maju dan negara berkembang untuk menjalin kerjasama global dalam memecahkan masalah perubahan iklim yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

<sup>2</sup> Mark Skousen. *The Structure of Production*. New York: New York University Press. 1990: 25-26

Sebaliknya konsep produksi Islam berangkat dari status manusia sebagai *'abd* dan *khalifah fi al-ardh*. Dengan status ini, kegiatan produksi menjadi manifestasi ketundukan manusia pada Allah SWT (QS Hud: 61) sekaligus menjadi sarana untuk mengaktualisasikan kemampuannya (QS al-An'am: 165). Kegiatan produksi tidak sekedar upaya memenuhi kebutuhan hidup sebagai *homo economicus* tapi juga menjadi sarana untuk mengupayakan keadilan sosial dan menjaga keluhuran martabat manusia. Al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi kerangka acuan untuk mengembalikan kegiatan produksi pada tujuan awalnya yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia secara total (dalam istilah as-Syaibani disebut *'imaratul kaun*). Seluruh proses dan kegiatan produksi mengarah pada pemuliaan status manusia, peningkatan kesejahteraan hidup, menghilangkan ketimpangan sosio-ekonomi, dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi.

Pandangan umum al-Qur'an tentang kegiatan produksi dapat diidentifikasi pada beberapa konteks:

- a. Status manusia sebagai *'abd* (hamba Allah) dengan kewajiban beribadah pada-Nya dan memakmurkan bumi (QS Hud: 61).
- b. Status manusia sebagai wakil Allah SWT (*khalifah fi al-Ardh*) yang memiliki perbedaan derajat, kemampuan, dan keahlian serta kewajibannya untuk saling tolong menolong dan bekerja sama (QS al-An'am: 165; at-Taubah: 71; dan al-Maidah: 32) serta berlaku adil (QS Shad: 26).
- c. Kewajiban setiap manusia untuk bekerja dalam mencukupi kebutuhan hidup dan mengaktualisasikan kemampuannya (QS at-Taubah: 105; Yunus: 61, 67; Hud: 121, 123).
- d. Kewajiban manusia mengelola dan mengambil manfaat dari sumber daya alam yang telah disediakan Allah SWT (QS al-Baqarah: 29; al-A'raf: 10; dan al-Qashash: 77).
- e. Landasan moral dan pengetahuan yang terpatri dalam diri manusia (QS as-Syam: 7-10; al-Baqarah: 31-32 dan an-Nur: 37-38).
- f. Kewajiban mendistribusikan harta kekayaan bagi kemaslahatan masyarakat (QS al-Ma'arij: 24-25; al-Hujarat: 10; at-Taubah: 103; dan al-Baqarah: 261-265).

Al-Qur'an menceritakan bahwa struktur masyarakat yang kuat memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahterannya. Misalnya dalam surat ar-Ra'd ayat 11 di mana upaya dan kerja keras manusia sendirilah yang mampu mengubah kejudaman hidupnya. Begitu pula cara menghindari kepicikan dan sempit pikir sebagai penyebab dosa manusia (QS al-Ma'arij: 19-21; an-Nisaa: 128; al-Hasyr: 9; at-Taghabun: 16; al-Isra': 11,100; an-Anbiya: 37; al-Qiyamah: 20-21).

Sebagai kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, produksi menekankan hubungan antara *input* yang digunakan dan *output* yang dihasilkan. Posisi produsen adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan ini memiliki implikasi yang luas. Selain untuk memenuhi skala kebutuhan berdasarkan permintaan konsumen dan meningkatnya kesejahteraan produsen, kegiatan produksi juga memiliki fungsi sosial yaitu mendistribusikan kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial produsen. Dengan kata lain, peningkatan kesejahteraan produsen dibarengi dengan kewajiban mendistribusikan kekayaannya dalam bentuk zakat, sedekah, infak atau dana CSR (*corporate social responsibility*). Tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan produsen dilakukan dalam koridor syariah yaitu larangan menjalankan bisnis yang bertentangan dengan Islam atau larangan menghasilkan barang dan jasa haram serta dapat menghancurkan martabat manusia. Pemenuhan kebutuhan manusia dilakukan secara rasional dengan asumsi: menawarkan variasi produk secara inovatif, memperoleh keuntungan dari aktivitas produksi, melakukan produksi secara efisien, memenuhi kebutuhan konsumen dalam skala prioritasnya.

Dalam konteks ini, pemberian benefit (zakat, infak, sedekah, atau dana CSR) tidak mengurangi tingkat keuntungan produsen. Modelnya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$P = U - Z - T$$

P	=	Permintaan konsumen
U	=	Tingkat Keuntungan
Z	=	Zakat
T	=	Pengeluaran Tambahan dari Keuntungan
R	=	Pendapatan Total
O	=	Ongkos Produksi
G	=	Charity (sedekah, infak)

Permintaan konsumen (P) merupakan selisih antara keuntungan (U) dengan zakat (Z) dan pengeluaran tambahan (T). Jika tingkat zakat =  $\partial$  dan tingkat pengeluaran lain =  $\delta$  maka

$$Z = \partial U = \partial (R-O-G)$$

$$T = \delta U = \delta (R-O-G)$$

Pengeluaran zakat (Z) diambil dari tingkat zakat terhadap keuntungan. Begitu juga dengan Pengeluaran tambahan (T) diambil dari tingkat pengeluaran lain atas keuntungan. Dengan demikian, zakat dan *social return* lainnya tidak mempengaruhi pengeluaran produsen dalam ongkos produksi. Dana zakat dan *social return* yang dikembalikan ke masyarakat bawah akan meningkatkan daya beli dan sisi permintaan.

## II. Moralitas Produksi Islam

Kegiatan produksi dalam Islam digerakkan oleh sistem moral (*moral-driven*)<sup>3</sup>. Moral menjadi acuan (*frame of reference*) untuk menghasilkan barang dan jasa, meng-efisienkan kinerja dan produktivitas, meningkatkan profit, serta menumbuhkembangkannya secara luas. Urgensi moral dalam produksi bermakna pengagungan manusia sebagai makhluk Tuhan, aktualisasi kemampuannya sebagai khalifah, serta menjalankan fungsi sosial bagi masyarakat<sup>4</sup>. Argumen ini membantah eksistensi manusia hanya sebagai *homo economicus*<sup>5</sup>. Dalam perspektif *homo economicus*, moral terpisah dari ekonomi. Sebaliknya dalam Islam, perilaku produksi adalah manifestasi ibadah, moralitas, dan ketundukan manusia pada Tuhannya. Meniadakan dimensi moral menyebabkan alienasi ekonomi dari kehidupan manusia. Produsen dalam Islam mengimplementasikan nilai moral dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dalam hal memenuhi permintaan konsumen, proses produksi, memperoleh modal, pertumbuhan usaha, serta diversifikasi produk untuk kelangsungan

---

<sup>3</sup> Haider Naqvi. *Ethics and Economics: an Islamic Synthesis*. Leicester: The Islamic Foundation. 1981: 21

<sup>4</sup> Fazlur Rahman menyebutkan tugas yang diemban manusia sebagaimana disebutkan al-Qur'an adalah membentuk tata sosial yang berlandaskan nilai-nilai moral. Kaidah moral dalam menjadi referensi kaum muslimin agar disequilibrium ekonomi dan ketimpangan sosial dapat diatasi. Rahman. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka. 1996: 54

<sup>5</sup> Celaan al-Qur'an terhadap penduduk Makkah Jahiliyyah disebabkan penekanannya yang dominan terhadap *homo economicus*. Misalnya dalam surat at-Takatsur: 1-4 dan al-Humazah: 1-7; al-Isra': 100. Celaan al-Qur'an terhadap politeisme masyarakat Makkah yang menyebabkan ketimpangan sosial dan eksploitasi, monopoli, kecurangan perdagangan, hidup bermewah-mewahan yang melahirkan ketimpangan ekonomi.

usaha<sup>6</sup>. Karena tidak lepas dari nilai moral, produksi berpengaruh langsung pada kehidupan sosial<sup>7</sup>.

Celaan al-Qur'an terhadap dis-ekuilibrium ekonomi dan ketimpangan sosial masyarakat Makkah menjadi bukti keinginan moral untuk merekayasa masyarakat yang adil (QS at-Takatsur: 1-4; al-Humazah: 1-7)<sup>8</sup>. Realitas ekonomi masyarakat Makkah Jahiliyah yang penuh dengan eksploitasi ekonomi, kecurangan dalam perdagangan, monopoli, mementingkan diri sendiri, dan hidup bermewah-mewahan hanya melahirkan penindasan manusia, menimbulkan bibit permusuhan, dan ketimpangan sosial ekonomi. Atas dasar itu, spirit ekonomi yang berlandaskan etika mampu menghilangkan ketimpangan itu.

Tujuan penting untuk merumuskan etika produksi dalam Islam adalah:

1. Sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah mengandung dimensi moral yang dominan melalui petunjuk pada manusia untuk bertindak dan berakhlak mulia. Hal ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia itu sendiri.
2. Dalam kegiatan produksi, peran moral bertujuan memberi arah yang jelas tentang manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengelola sumber daya ekonomi, meningkatkan taraf kesejahteraan hidup, serta menggagas kesejahteraan bagi masyarakat luas<sup>9</sup>.
3. Peran moral dalam kegiatan produksi adalah keberpihakan pada kehidupan manusia, alam, dan Tuhan serta mendorongnya untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi sesuai dengan tuntunan Allah SWT.
4. Dalam kegiatan produksi, aksioma etika menjadi dasar dalam memberi arah dengan mempertimbangkan tatanan nilai dan norma Islam seperti hak dan kewajiban manusia dalam hidup, kewajiban produsen/pemilik modal, hak dan kewajiban karyawan, kewajiban menjaga kelestarian sumber alam, produksi barang yang mempromosi keluhuran martabat manusia, serta mengembangkan mekanisme produksi yang efektif dan efisien<sup>10</sup>.

Untuk menyusun aksioma etika produksi dalam Islam maka upaya yang dilakukan adalah:

- a) Membuat asumsi yang rasional dengan variabel ekonomi serta hubungan tentatif-nya melalui pandangan dunia Islam tentang produksi.  
Setiap agama memiliki asumsi dasar tentang kehidupan manusia dan pengetahuan tentangnya. Islam mendasarkan diri pada al-Qur'an. Pengungkapan perilaku dan konsep produksi dalam al-Qur'an menyangkut relevansi dengan hidup manusia, alam semesta, makhluk yang lain secara luas termasuk konsumsi, distribusi, sistem keuangan, dan lain-lain. Semua konsep dan perilaku ini membentuk kerangka teori (*conceptual framework*) konsep produksi dalam Islam<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> Haider Naqvi. *Ethics and Economics: an Islamic Synthesis*. Leicester: The Islamic Foundation. 1981: 71

<sup>7</sup> Daniel Hausman and Michael McPherson. *Economic Analysis and Moral Philosophy*. Cambridge: Cambridge UP. 1996: 56

<sup>8</sup> Fazlur Rahman. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka. 1996: 55

<sup>9</sup> Haider Naqvi. *Islamic, Economics and Society*. London: Paul Kegan International. 1983: 55

<sup>10</sup> Haider Naqvi. *Ethics and Economics: an Islamic Synthesis*. Leicester: The Islamic Foundation. 1981: 18

<sup>11</sup> Kerangka teoritis ini disistematisir menjadi prinsip, postulat, dan asumsi yang akan diinvestigasi kebenaran ilmiahnya. Misalnya dalam konsep riba yang disebutkan al-Qur'an dalam empat konteks. 1) menolak anggapan bahwa pinjaman riba seolah-olah perbuatan yang mendekatkan diri pada Allah SWT (Ar-Ruum: 39), 2) Riba merupakan suatu yang buruk dan Allah mengancam keras orang Yahudi yang makan riba (An-Nisaa: 160-161), 3) Riba diharamkan karena keterkaitannya dengan pelipatgandaan keuntungan (Ali Imran: 130), dan 4) Allah menegaskan larangan (mengharamkan) setiap jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (al-Baqarah: 278-279). M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute. 2001: 48-50. Kerangka teoritis tentang riba ini melahirkan berbagai postulat dan asumsi. Sejumlah

- b) Menetapkan secara normatif prinsip, hukum, dan model produksi Islam. Setelah menemukan asumsi dasar kegiatan produksi, asumsi tersebut diulas secara kritis untuk menemukan model dan prinsip produksi. Setelah itu diujicoba pada ranah empiris sehingga menjadi paradigma produksi dalam Islam.

Bagi sistem ekonomi yang berbasis agama, fakta empiris sesungguhnya tidak memberikan dasar kebenaran yang pasti sehingga perlu dibedakan antara fakta dengan kebenarannya<sup>12</sup>. Oleh sebab itu, pendasaran ekonomi Islam lebih menekankan kebenaran al-Qur'an<sup>13</sup>.

- c) Menguji coba model dengan realitas empiris. Proses pengujian model produksi dengan realitas empiris bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kerangka normatif produksi Islam mampu mengubah dan memberikan pedoman umum bagi kegiatan produksi. Misalnya tanggung jawab sosial produsen (*corporate social responsibility*) terhadap masyarakat melalui *social return* dalam zakat, sedekah, infak, atau dana CSR. Dapat juga diujicoba pemahaman produsen tentang sistem nilai Islam dalam produksi sehingga dapat dideteksi sejauhmana kesadaran religiusnya mempengaruhi proses produksi atau bisnis. Jika diperoleh hasil yang korelatif antara konsep dan hipotesis maka kerangka teori dapat dibangun secara sistematis. Sebaliknya jika tidak korelatif maka dibutuhkan pengujian ulang (*rechecking*).

Kerangka etika produksi yang dibangun al-Qur'an adalah sebagai berikut:

#### A. Aksioma Tauhid

Dalam aksioma tauhid muncul keyakinan manusia secara total dan murni terhadap eksistensi Tuhan. Kehidupan dunia yang bersifat nisbi dan terbatas berbanding dengan eksistensi Dzat Yang Maha Sempurna dan tak terbatas. Relasi ini bersifat vertikal karena kehidupan dunia adalah manifestasi kekuasaan-Nya yang tak terbatas. Atas dasar itu, keberadaan manusia dan makhluk lain merupakan bagian integral dari Sang Khalik.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (QS ad-Dzariyat: 56)

Umat manusia dan makhluk hidup lainnya adalah hamba (*'abd*) yang dibebaskan dari penghambaan selain Dia. Tujuan hidup manusia adalah “mengabdikan” dan mengaktualisasikan potensi diri sesuai petunjuk Allah SWT.

Keyakinan terhadap Allah SWT menjadi landasan awal kegiatan produksi. Keyakinan ini mengatakan manusia harus menemukan “jalan yang benar” dalam kehidupan dunia agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Kegiatan produksi adalah bentuk

---

kalangan sarjana Islam melihat pelarangan riba sebagai pelarangan terhadap bunga bank. Yang lain memandang riba sebagai “keuntungan tanpa kerja keras (*unearned gain*)”, atau sebagai bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia.

<sup>12</sup> Fakta empiris hanya didasarkan pada kemampuan indera dalam memberikan pengetahuan. Dalam realitas agama, fakta mencakup empiris dan non-empiris (hal-hal gaib seperti Tuhan, malaikat, dll). Solusi ilmiah untuk menengahi masalah ini adalah kesadaran rasional manusia dalam menangkap kehadiran realitas “kasat mata” itu.

<sup>13</sup> Dalam epistemologi Islam, realitas empiris merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pewahyuan al-Qur'an. Dengan demikian jika penafsiran terhadap al-Qur'an adalah benar maka sistem dan model ekonomi pun akan benar.

ketundukan, pengabdian manusia, serta pengembangan potensi kemanusiaannya dengan cara mengolah alam semesta dan faktor produksi lainnya; menjalankan bisnis yang menguntungkan; aktualisasi pengetahuan untuk mencari nafkah yang halal; serta meningkatkan kesejahteraan hidup individu dan kolektif.

Secara spesifik, kegiatan produksi merupakan manifestasi keluhuran manusia sebagai 'abd dan khalifah Allah SWT. Kegiatan produksi didasari kesadaran bahwa manusia wajib memakmurkan bumi dan membentuk tata sosial yang etis. Dalam proses pengelolaan alam, manusia menjadi pemilik relatif atas hasilnya. Dalam kepemilikan relatif ada kewajiban manusia untuk mendistribusikannya bagi golongan masyarakat karena perbedaan derajat dalam kemampuan, kepemilikan harta, dan pengetahuan adalah faktisitas kemanusiaannya.

Ketika diberlakukan oleh produsen secara sadar, aksioma tauhid menjadi prinsip tauhid dengan kriteria moral yang paling luhur. Pengakuan terhadap kehadiran Tuhan menjadi prinsip etika yang dapat diaplikasikan oleh siapapun demi keuntungan manusia itu sendiri.

## B. Aksioma Keadilan

Jika aksioma tauhid menjadi dimensi vertikal antara manusia *vis a vis* Tuhan maka aksioma keadilan adalah dimensi horizontal. Walaupun *al-'adl* merupakan salah satu sifat Tuhan tapi implementasinya menjadi standar perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain atau alam semesta. Perintah berlaku adil dalam al-Qur'an bertujuan untuk mengeliminasi ketimpangan ekonomi dan sosial.

مُرُّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَاصْفَاءَ الْوَجْهِ لِلْأُولَىٰ يُعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, munkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*(QS an-Nahl: 90).

Al-Qur'an menyebutkan bahwa berlaku adil ditujukan bagi siapa saja tanpa memandang suku bangsa dan agama. Bahkan kebencian pun tidak boleh menjadi penghalang untuk berlaku adil (QS al-Maidah: 8).

Kegiatan produksi menjadi sarana promosi konsep keadilan untuk menghilangkan ketimpangan dan disequilibrium ekonomi. Sumber daya ekonomi dan kekayaan dipahami sebagai “amanah” dan manusia harus mendistribusikannya secara merata. Pemanfaatannya menjadi sarana untuk mengusung standar kehidupan yang bermartabat.

Aksioma keadilan menjadi standar perilaku produsen dalam memperlakukan faktor-faktor produksi. Tenaga kerja, sumber daya alam, dan modal harus ditempatkan secara proporsional. Dalam hal ini, Islam menghargai perbedaan kemampuan dan potensi di antara manusia sehingga tidak mungkin setiap individu diperlakukan sama. Atas dasar itu, Islam menekankan implementasi keadilan distributif.

Aksioma keadilan dalam kegiatan produksi menjadi standar umum kegiatan produksi baik dalam menyusun kebijakan internal, menumbuhkembangkan bisnis, jual-beli, pengeluaran benefit, dan lain sebagainya.

### C. Aksioma Kebajikan

Aksioma kebajikan (*al-maslahah*) menghubungkan dimensi vertikal dan horizontal. Secara vertikal, kebajikan adalah manifestasi status manusia sebagai *khalifah* Allah. Secara horizontal, perbedaan derajat, kemampuan, dan kekayaan adalah “ujian” bagi manusia untuk memperkuat basis kehidupan sosial dengan saling membantu dan bekerja sama.

Sebagai derivasi prinsip tauhid, manusia wajib menyebarkan kebajikan di muka bumi karena esensi penciptaannya adalah kebaikan. Aktualisasi kemampuan adalah kebaikan, harta kekayaan yang dimilikinya juga merupakan kebaikan. Begitu pun pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk peningkatan kesejahteraannya adalah sebiah kebaikan.

Al-Qur’an menggambarkan aksioma kebaikan ini dalam berbagai ayat. Salah satunya dalam al-Baqarah ayat 195,

بِرَبِّهِ اللَّهِ وَالْأَوْلَادِ أَفْقَادًا فِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (*hartamu*) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Aksioma kebajikan dalam al-Qur’an mengandung makna luas yaitu pemenuhan kebutuhan diri, memenuhi hak masyarakat, melestarikan alam semesta, mendistribusikan harta kekayaan yang dimilikinya secara proporsional. Misalnya Islam menghormati individu yang memiliki harta. Hal ini berkaitan dengan kandungan kebaikan pada harta kekayaan sehingga manusia selalu meningkatkan kebaikan dalam hidupnya.

Tata cara produksi yang efisien, pengelolaan sumber daya manusia, alih teknologi secara arif, pelestarian sumber daya alam, dan penggunaan sumber dana yang halal menjadi dorongan bagi kebaikan kegiatan produksi yang bertujuan mengagungkan status manusia di hadapan Tuhan dan sesama makhluk hidup.

Aplikasi aksioma kebajikan akan menjadi prinsip kebajikan yang bermuara pada hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia.

### D. Aksioma Kebebasan dan Tanggung Jawab

Aksioma kebebasan dan tanggung jawab ibarat sekeping mata uang yang tak terpisahkan. Manusia dalam Islam dilahirkan bebas serta diberi potensi untuk menentukan pilihannya. Setiap pilihan mengandung konsekuensi yaitu pertanggungjawaban. Kebebasan yang dimiliki manusia bersifat relatif karena kebebasan memilih tidak dapat menentukan kadar kebenaran pilihannya itu. Manusia yang bebas membutuhkan bimbingan agar tidak terjebak pada pilihan yang salah.

Varian yang menekan dimensi kebebasan manusia adalah tanggung jawab. Aksioma tanggung jawab ini menyatu dengan status kekhalifahan manusia. Aksioma tanggung jawab mengandung pengertian yang esensial yaitu setiap perilaku bebas manusia memiliki implikasi moral terhadap diri, masyarakat, dan Tuhannya.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ....

*“Dan katakanlah (Muhammad), kebenaran itu datangnyanya dari Tuhanmu; barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir .... “(QS al-Kahfi: 29).*

Bagi yang memilih jalan kebaikan (beriman kepada Allah SWT dan beramal saleh) akan mendapatkan ganjaran dari-Nya (QS al-Kahfi: 30). Aksioma kebebasan juga ditegaskan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi (QS al-Mulk: 15). Dengan demikian, manusia diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan kemampuan ekonominya disertai tanggung jawab untuk mengagungkan status manusia dan stabilitas sosial.

Aksioma kebebasan dan tanggung jawab menjadi prinsip kebebasan dan tanggung jawab di mana manusia bebas mengaktualisasikan dirinya secara maksimal dengan pembatasan oleh prinsip tanggung jawab.

### III. Implikasi Moralitas Produksi

Pemberlakuan etika dalam kegiatan produksi memberi pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, kelestarian lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

#### 1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam bersifat sarat nilai (*value-loaded*). Ekonomi tidak dapat dikatakan tumbuh (*growing on*) jika sektor produksi tidak memberikan pengaruh bagi peningkatan kesejahteraan<sup>14</sup>. Indikatornya adalah meningkatnya standar hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat secara gradual yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesempatan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas ekonominya secara maksimal. Atas dasar itu, pertumbuhan ekonomi memperhatikan dua hal, yaitu (a) mempertimbangkan sektor konsumsi berdasarkan utilitasnya dan (b) memilih sektor produksi barang/jasa berdasarkan manfaat dan orientasi pembangunan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan konsumen secara berjenjang berdasarkan utilitas segmen masyarakat sangat dibutuhkan. Adapun sektor produksi dapat menjadi landasan pertumbuhan ekonomi dalam hal meningkatnya jumlah faktor produksi.

Implikasi positif dari perkembangan ini adalah rendahnya angka pengangguran, meningkatnya pendapatan negara untuk kemakmuran masyarakat, kuatnya fundamen ekonomi, dan lain sebagainya<sup>15</sup>. Walaupun demikian, peningkatan kesejahteraan tidak cukup melalui indikator PDB saja karena bersifat hanya *necessary condition*. Komponen lain seperti meningkatnya moralitas masyarakat dan kebahagiaan juga menjadi tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat secara total. Secara umum, indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada masyarakat adalah tingkat distribusi kesejahteraan bagi keluarga, pemberdayaan sektor pedesaan, dan pengarusutamaan kaum miskin dan dhuafa<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Abulhasan Muhammad Sadeq. *Economic Development in Islam*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications. 1990: 15

<sup>15</sup> Tingginya angka pertumbuhan yang hanya ditopang oleh sektor konsumsi sebenarnya mengakibatkan kehancuran ekonomi jangka panjang. Terbukti dari meningkat tajamnya harga komoditas dan biaya hidup merupakan akibat dari tingginya biaya produksi. Peningkatan sektor industri yang berorientasi konsumen ditunjukkan oleh pertumbuhan sektor telekomunikasi. Perkembangan sektor ini biasanya terkait dengan perkembangan pelanggan telepon nirkabel. Jika jumlah pelanggan sudah maksimal maka sektor ini akan melemah dengan sendirinya. Umar Juoro “Ekonomi Melaju Dengan Suhu Tinggi” dalam *Republika* edisi 8 September 2008.

<sup>16</sup> Nurul Huda, et.al. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada. 2008: 29-32

Dalam hal ini, kebijakan pertumbuhan ekonomi Islam justru memperkuat sektor riil dalam meningkatkan kinerja dan stabilitas sektor finansial. Atas dasar itu perlu diupayakan kebijakan yang mengarah pada optimalisasi potensi sektor produksi masyarakat melalui pemberian kredit mikro<sup>17</sup>. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu memberikan pengaruh pada PDB masyarakat karena pertumbuhannya tidak mampu menyerap tenaga kerja baru. Jika pertumbuhan didukung oleh sektor padat modal maka angka pengangguran dan kemiskinan akan tetap tinggi<sup>18</sup>.

Dalam konteks ini, strategi keuangan mikro Islam menggagas instrumen keuangan mikro melalui fungsi intermediasi perbankan syariah dan lembaga keuangan non-bank<sup>19</sup>. Melalui mekanisme bagi hasil, sistem perbankan Islam akan menguji kelayakan usaha dan *return* bagi hasil sehingga modal finansial cepat bergerak ke sektor produktif<sup>20</sup>. Dengan demikian setiap anggota masyarakat yang memiliki ide dan kapasitas *entrepreneurship* memperoleh pinjaman modal<sup>21</sup>. Jika wirausaha memperoleh akses dalam mendapatkan modal finansial maka penawaran agregat akan naik serta mampu menciptakan lapangan kerja baru.

## 2. Pemerataan dan keadilan distributif

Implementasi etika pada sektor produksi menggugah kesadaran masyarakat untuk mengeliminasi jurang sosial dan ekonomi. Mengacu pada buruknya kondisi sosial ketika ketimpangan sosial tinggi maka peran *economic agents* dibutuhkan untuk melakukan distribusi kekayaan secara proporsional. Hal ini penting karena ketidakmerataan secara umum disebabkan perbedaan tingkat pendapatan antar kelompok masyarakat. Satu kelompok meningkat pendapatannya tapi mengurangi pendapatan kelompok yang lain<sup>22</sup>. Kelompok yang pertama memiliki kesempatan besar menambah nilai pendapatannya sehingga aktivanya dapat dikelola seproduktif mungkin. Kondisi ini mempengaruhi tingkat pendapatan dan distribusi kekayaan karena kesempatan tersebut. Adapun kelompok yang lain tidak memiliki kesempatan

---

<sup>17</sup> Dalam pertemuan *Credit-Micro Summit* Regional Asia-Pasifik di Nusa Dua Bali akhir bulan Juli 2008 disepakati pentingnya *linkage* antara sektor perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro untuk bekerja sama meningkatkan kapasitas sektor mikro. Tapi di Indonesia sendiri terhalang kendala regulasi di mana belum ada Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro sehingga operasionalisasi lembaga ini seperti tidak legal. Berbagai upaya telah dilakukan dalam memfasilitasi pemberian kredit mikro itu seperti pemberlakuan suku bunga khusus yang berbeda dengan kredit korporasi dan konsumtif, mendorong pengesahan RUU LKM di DPR, serta meningkatkan sinergitas bank komersial untuk membantu LKM. Harian *Republika* 31 Juli 2008.

<sup>18</sup> Dalam laporan terbaru BPS ditenggarai bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai target pertumbuhan dalam APBN-P 2008 yaitu sebesar 6,36 persen yang didukung oleh sektor pertanian. Tapi pertumbuhan tersebut tidak mampu menyerap tenaga kerja di mana dalam prediksi APBN setiap kenaikan 1 persen mampu menyerap 400 ribu tenaga kerja sedangkan tingkat pertumbuhan 2008 hanya mampu menyerap 200 ribu orang. Harian *Republika* 15 Agustus 2008.

<sup>19</sup> Dalam sistem konvensional, fungsi intermediasi perbankan diarahkan untuk memberi kredit pada kelompok masyarakat yang memenuhi *creditworthiness* saja yaitu kelompok yang mampu mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya sehingga tidak memberikan pengaruh positif bagi *return* di sektor riil. Yusuf Wibisono “Menimbang Keuangan Mikro Perspektif Islam” dalam Harian *Republika* 18 Agustus 2008.

<sup>20</sup> Dalam sistem perbankan Islam, modal hanya layak memperoleh *return* jika proyek usahanya berhasil. Kalau gagal maka modal membagi risiko dan menanggung kerugian. Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan karena masing-masing pihak berbagi risiko untuk menjalankan usahanya secara maksimal.

<sup>21</sup> Kelayakan usaha menjadi prioritas utama bagi bank untuk membiayai sektor usaha kecil dan menengah sehingga kredit macet (*non-performing loan*) rendah dan efisiensi modal finansial tepat sasaran. Implikasi lain yang tak kalah penting adalah keluasaan lembaga keuangan Islam untuk membiayai sektor produktif di mana sumber pendanaan tidak terbatas pada dana pihak ketiga (DPK) tapi juga dana zakat, wakaf, dan lain-lain.

<sup>22</sup> Dalam al-Qur’an secara eksplisit telah menyitir ketimpangan ini dalam surat al-Hasyr ayat 7 “*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya diantara kalian*”.

dan rangsangan yang sama sehingga nilai pendapatannya cenderung dimanfaatkan oleh kelompok pertama untuk kepentingannya sendiri.

Solusi paling logis dari keadaan ini adalah transfer pendapatan dari yang meningkat ke yang menurun. Fungsi dari transfer adalah untuk menyediakan cadangan kesejahteraan bagi kelompok kedua sehingga jika terjadi peningkatan harga pasar, tidak hanya kelompok pertama saja yang meningkatkan pendapatannya tapi juga kelompok kedua. Dalam ilmu ekonomi diyakini bahwa ada hubungan berkesinambungan antara pertumbuhan, efisiensi, keadilan (*equity*), dan perbedaan pendapatan (*inequality of income*). Pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan keseimbangan dan ketidakseimbangan pendapatan. Oleh sebab itu, konsep distribusi menyangkut empat hal, yaitu: pengelolaan sumber daya ekonomi; mekanisme pasar dan redistribusi sistem dalam kaitannya dengan sektor produksi, tenaga kerja, dan upah; politik ekonomi yang menegaskan kebijakan strategis pemerintah untuk distribusi pendapatan; pembiayaan sektor produktif<sup>23</sup>.

Konsekuensi implementasi etika produksi dalam hal pemerataan dan keadilan distributif memiliki batasan tertentu. Barang dan utilitasnya diorientasikan pada distribusi barang halal, manfaatnya bagi manusia, serta meningkatkan utilitasnya. Keadilan distributif tidak hanya bermakna transfer kekayaan tapi mengandung mekanisme pertukaran. Hanya objeknya bersifat immaterial seperti pahala di akhirat. Seluruh pelaku ekonomi dalam Islam harus memperhatikan: (a) manfaat secara syar'i yaitu aspek manfaat dari kegiatan produksinya bagi masyarakat di samping setiap upaya produksi yang dilakukan melalui mekanisme pasar, (b) setiap produsen bebas melakukan kegiatan produksi dengan tidak merusak lingkungan, dan (c) restrukturisasi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

### 3. Kelestarian lingkungan hidup

Memelihara kelestarian lingkungan hidup menjadi tugas setiap manusia (QS Hud: 61) karena sumber daya alam merupakan amanah. Produsen memiliki kapasitas untuk memelihara kelestarian alam dengan alasan: (a) ia menjadi pihak yang paling berkepentingan terhadap ketersediaan sumber daya alam, (b) pengelolaan dan pemanfaatan alam memberikan kesempatan besar bagi produsen untuk meningkatkan kekayaannya dibandingkan kelompok masyarakat yang lain.

Salah satu implikasi dari pemberlakuan etika produksi adalah munculnya kesadaran ekologis pada produsen untuk memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, himbuan moral (*moral suassion*) dari pemerintah untuk menggagas pembangunan berwawasan lingkungan sangat dibutuhkan<sup>24</sup>. Hubungan yang erat antara aktivitas ekonomi dengan sumber daya alam menjadikan upaya strategis untuk melestarikan lingkungan sangat penting. Implementasi etika produksi dalam aktivitas produksi berusaha menggugah kesadaran produsen dan pelaku ekonomi lain untuk mengupayakan pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup sebagai sumber daya ekonomi yang terbatas. Pihak-pihak tersebut menjalankan konsep *environmental economics* yaitu memperhatikan efek dari aktivitas produksinya terhadap kerusakan lingkungan hidup terutama mengenai *market failure*<sup>25</sup>. Dengan demikian, mekanisme

---

<sup>23</sup> Mustafa Edwin Nasution, et.al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Kencana. 2006: 134

<sup>24</sup> Pembangunan berwawasan lingkungan (*eco-development*) biasanya disandingkan dengan ekonomi lingkungan (*ecological economics*). Ekonomi berwawasan lingkungan menekankan hubungan saling bergantung antara aktivitas ekonomi dengan sistem ekologi yang alamiah. "ecological economics" dalam www.prenhall.com. 20/10/2008

<sup>25</sup> *Market failure* adalah kegagalan mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Misalnya pasar tidak mengalokasikan sumber daya terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. "Environmental economics" dalam www.prenhall.com. 20/10/2008

produksi yang dijalankan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam bentuk keseimbangan penawaran dan permintaan serta efisiensi pemanfaatan sumber daya terbatas untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.

4. Tanggung jawab sosial perusahaan

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen produsen untuk memberikan kontribusinya dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic*) dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan hidup dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan<sup>26</sup>. Dengan kata lain, CSR adalah strategi simbiosis antara perusahaan dengan masyarakat dalam mengupayakan kesejahteraan bersama melalui dedikasi dan peran sosial perusahaan sehingga tercipta harmonisasi yang saling menguntungkan<sup>27</sup>. Berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang menyertai perkembangan ekonomi membuat produsen mendesain ulang konsep produksinya agar berjalan sinergis dengan kondisi masyarakat. Atas dasar itu, keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan program CSR sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak mereka menjadi *volunteer*, sebagai objek pemberdayaan, dan sumber informasi sehingga program CSR mampu mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang bersangkutan.

Implementasi etika produksi mewajibkan produsen dalam Islam untuk mengembangkan program CSR-nya secara kontinyu. Program ini dilakukan dalam berbagai kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat dan *stakeholders*. Program CSR dapat disebut sebagai kewajiban produsen karena mereka harus peduli dan terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Salah satunya adalah zakat, sedekah, dan infak. Kewajiban produsen untuk membayar instrumen ini merupakan bentuk awal program CSR.[ ]

---

<sup>26</sup> Hendrik Budi Untung. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008: 1

<sup>27</sup> Ahyudin “Strategi Membangun Budaya Humanis Perusahaan” dalam Harian *Republika* edisi 20 April 2007. Ada banyak lagi definisi tentang CSR ini. Salah satunya adalah CSR sebagai bentuk komitmen dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mengedepankan perbaikan kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute

Hausman, Daniel and Michael McPherson. 1996. *Economics Analysis and Moral Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press

Huda, Nurul, et.al. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Prenada Kencana

Naqvi, Haider. 1981. *Ethics and Economics: an Islamic Synthesis*. Leicester: The Islamic Foundation

\_\_\_\_\_. 1983. *Islamic, Economics and Society*. London: Paul Kegan International.

Nasution, Mustafa Edwin., et.al. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Kencana

Rahman, Fazlur. 1996. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka

Sadeq, Abulhasan Muhammad. 1990. *Economics Development in Islam*. Kualalumpur: Pelanduk Publications.

Skousen, Mark. 1990. *The Structure of Production*. New York: New York University Press.

Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika

Suratkabar:

Umar Juoro “Ekonomi Melaju Dalam Suhu Tinggi” dalam *Republika* edisi 8 September 2008

Yusuf Wibisono “Menimbang Keuangan Mikro Perspektif Islam” dalam *Republika* edisi 18 Agustus 2008

Ahyudin “Strategi Membangun Budaya Humanis Perusahaan” dalam *Republika* edisi 20 April 2007

*Republika* edisi 31 Juli 2008

*Republika* edisi 15 Agustus 2008

Website:

“Ecological Economics” dalam [www.prenhall.com](http://www.prenhall.com). Diakses tanggal 20-10-2008

“Environmental Economics” dalam [www.prenhall.com](http://www.prenhall.com). Diakses tanggal 20-10-2008